

Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banyumas: Studi Kasus Era Achmad Husein

Hanik Rosyidah

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
haniarsyida@gmail.com

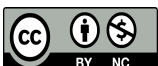
ABSTRACT

The waste problem is a complex environmental problem. In reality, not many leaders are able to commit to solving the waste problem. The waste crisis in Banyumas Regency which peaked in 2018, also made Achmad Husein, as Regent of Banyumas at that time, directly involved in handling the problem, even using his personal funds. This research analyzes Achmad Husein's leadership character, which has good governance principles, as well as the economic impact of the waste management initiated by him. The research was carried out using a qualitative approach with data collection techniques in the form of content analysis, using the content of kasisolusi's podcast. Research findings show that Achmad Husein's leadership character reflects the principles of good governance in the form of participation, transparency, accountability, effectiveness and efficiency, responsiveness and equity. Achmad Husein's use of personal funds indicates his commitment and integrity in solving urgent problems. This dedication has produced results that have had a significant economic impact on the welfare of society. Apart from that, the success of the SUMPAH BERUANG (Enchant Trash Turns Money) program, has made Banyumas becoming a representative for Smart Green ASEAN Cities. The excellent solution to the waste problem in Banyumas has become a sustainable waste management system. It is hoped that the results of this research provides motivation for all communities to recommit in taking responsibility for mandated work and distance themselves from corrupt behavior in overcoming various problems, especially threatening environmental problems.

Keywords: *Good Governance; Waste Management; Banyumas Regency; Podcast.*

ABSTRAK

Masalah sampah adalah masalah lingkungan yang rumit. Pada kenyataannya tidak banyak pemimpin yang mampu berkomitmen menyelesaikan masalah sampah. Krisis sampah di Kabupaten Banyumas yang memuncak pada tahun 2018, turut membuat Achmad Husein sebagai Bupati Banyumas pada waktu itu, terjun langsung menangani masalah hingga menggunakan dana pribadinya. Penelitian ini menganalisis karakter kepemimpinan Achmad Husein yang berprinsip *good governance*, serta dampak ekonomi dari pengelolaan sampah yang diinisiasi olehnya. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa *content analysis*, menggunakan sumber konten podcast kasisolusi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa karakter kepemimpinan Achmad Husein mencerminkan prinsip-prinsip *good governance* berupa partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, responsif, dan keadilan. Penggunaan dana pribadi oleh Achmad Husein menandakan komitmen dan integritasnya dalam menyelesaikan masalah yang mendesak. Dedikasinya itu membuahkan hasil yang memberikan dampak ekonomi signifikan untuk kesejahteraan masyarakat. Selain



itu, kesuksesan program SUMPAAH BERUANG (Sulap Sampah Berubah Uang) mengantarkan Banyumas menjadi percontohan Smart Green ASEAN Cities. Penyelesaian masalah sampah yang unggul di Banyumas telah menjadi sebuah sistem kelola sampah yang berkelanjutan (sustainable). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi bagi semua kalangan untuk kembali berkomitmen menanggung jawab pekerjaan yang diamanatkan dan menjauhkan diri dari perilaku koruptif dalam mengatasi berbagai masalah, terutama masalah lingkungan yang mengancam.

Kata Kunci : *Good Governance; Pengelolaan Sampah; Kabupaten Banyumas; Podcast.*

Pendahuluan

Sampah masih menjadi masalah nasional yang belum ditemukan solusi optimalnya, bahkan cenderung menjadi isu berulang setiap tahunnya. Di kota-kota besar Indonesia, masalah sampah baik dari rumah tangga maupun industri masih menjadi ancaman serius bagi lingkungan (Jambeck et al., 2015). Berdasarkan penelitian Jenna Jambeck yang dipublikasikan dalam jurnal *Science* pada tahun 2015, sampah rumah tangga dan plastik sekali pakai menjadi masalah yang terus berlanjut. Indonesia menempati peringkat kedua di dunia sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak ke laut.

Akibat dari pertumbuhan industri yang cepat dan perubahan gaya hidup manusia saat ini, jumlah sampah yang dihasilkan semakin meningkat. Pada tahun 2009, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mencakup berbagai prinsip, termasuk yang ditegaskan dalam Pasal 2 huruf m, yang menyatakan: “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas tata kelola pemerintahan yang baik.” Dalam dunia internasional, konsep tata kelola pemerintahan yang baik dikenal dengan istilah *good governance*, yang pertama kali disampaikan oleh *World Bank* pada tahun 1989. Prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas menjadi landasan utama dalam menangani berbagai isu publik, termasuk pengelolaan sampah. Eks Bupati Banyumas, Ir. Achmad Husein, telah menunjukkan dedikasinya terhadap prinsip-prinsip ini melalui berbagai inisiatif dan kebijakan yang diterapkan untuk mengelola sampah di daerahnya (Pratama & Aziz, 2024).

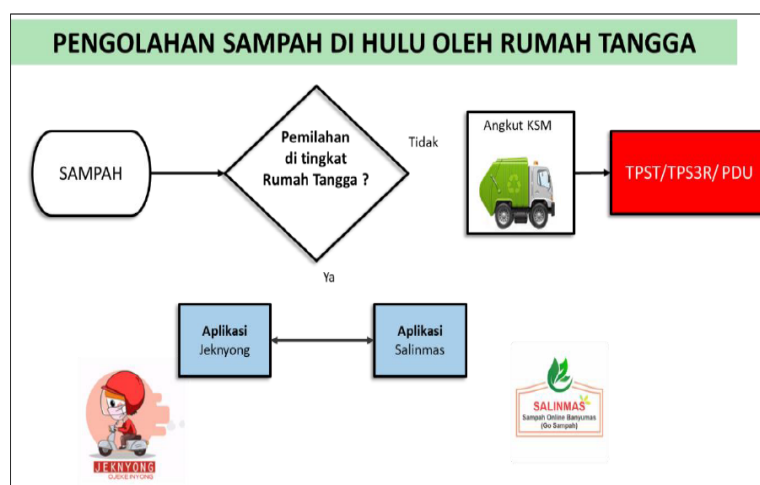
Mei 2018, Banyumas mengalami bencana lingkungan yang serius akibat hujan besar yang melanda wilayah tersebut. Hujan deras menyebabkan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) di Desa Kaliiori, Kabupaten Banyumas, jebol. TPA tersebut tidak mampu menampung volume air hujan yang sangat besar, sehingga tanggul penahan sampahnya

pecah. Kejadian ini mengakibatkan sampah-sampah yang tertampung di dalam TPA tersebut terbawa aliran air hujan menyebar ke lingkungan sekitar, dan kolam lindi di TPA pun mengalami kebocoran sehingga meracuni persawahan, mencemari tanah, sungai, dan permukiman warga di sekitar TPA. Warga yang tinggal di sekitar lokasi kejadian menghadapi dampak dari bencana yang berupa bau busuk dan potensi risiko kesehatan akibat pencemaran lingkungan (kasisolusi, 2024).

Kejadian TPA Kaliori yang jebol mengakibatkan Banyumas mengalami krisis sampah, warga kemudian banyak yang membuang sampah rumah tangga di jalanan hingga ke kawasan alun-alun kota. Banyumas darurat sampah, warga masyarakat pun melakukan protes dan demonstrasi menuntut dilakukannya penutupan TPA Kaliori. Pemerintah setempat berupaya mencari TPA lain dan lahan baru untuk menampung banyaknya sampah. Dengan kejadian ini, akhirnya ditemukan jalan keluar pertama yang menjadi bagian dari kebijakan sistem kelola sampah inisiatif eks Bupati Achmad Husein, yaitu penyelesaian sampah di hulu (Agung Barok Pratama, Arina Manasikana, 2023).

Achmad Husein pada waktu itu mengeluarkan Surat Edaran Nomor 660.1/7776/2018 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banyumas. Dalam SE tersebut memuat hal terkait perubahan pola pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas. Sebelumnya, pengelolaan sampah hanya sekedar dikumpulkan, diangkut lalu buang ke TPA. Pola tersebut berubah menjadi pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang dilakukan dari sumbernya (Suyanto et al., 2015). Pada saat itulah pengelolaan sampah di hulu dilakukan.

Tabel 1. Bagan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Hulu



Sumber: Jurnal Akuntabilitas Pengelolaan Sampah
di Kabupaten Banyumas Melalui Program Sumpah Beruang

Kebijakan pengelolaan sampah pasca ditutupnya TPA Kaliori dilakukan secara terintegrasi dari hulu ke hilir. Serangkaian tahapan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir pada akhirnya menghasilkan sampah berubah bentuk menjadi produk yang bernilai ekonomi dan circular ekonomi. Selain itu, sistem kelola sampah ini juga memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja di masyarakat (Pratama, 2024b).

Pemerintah Kabupaten Banyumas, di bawah kepemimpinan Ir. Achmad Husein menciptakan suatu sistem pengelolaan sampah yang memastikan pelaksanaannya berjalan secara optimal. Dorongan pemerintah terhadap masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaannya juga sangat penting. Penanganan masalah sampah di Banyumas melibatkan masyarakat dan Kelompok Swadaya Masyarakat yang berperan sebagai operator. Pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup memiliki peran sebagai regulator. Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya sebagai pelaksananya, dan eks Bupati Banyumas, Achmad Husein, memiliki andil sebagai inisiator terwujudnya sistem pengelolaan sampah. Partisipasi berbagai pihak yang saling bersinergi dan memiliki visi yang sama untuk pengelolaan yang efektif, menunjukkan adanya indikasi praktik *good governance* itu sendiri.

Hal yang tidak luput dari perhatian penulis adalah sikap kepemimpinan Bupati Banyumas pada waktu itu yang merupakan *mastermind* sistem kelola sampah di Banyumas. Masalah sampah adalah persoalan lingkungan yang berat dan *complex*. Pada kenyataannya tidak banyak pemimpin yang mampu berkomitmen menyelesaikan masalah sampah. Eks Bupati Banyumas, Achmad Husein, memiliki rasa tanggung jawab tinggi yang dibuktikan dengan keberhasilannya menangani masalah sampah di daerahnya (Muabezi, 2017). Tokoh yang kini dijuluki sebagai Bapak Sampah Nasional, telah menjadi konsultan di bidang lingkungan, khususnya penanganan sampah, yang berbicara di banyak forum hingga keluar negeri, seperti Mesir, Jepang, Korea, Thailand, dan Singapura. Bahkan, program pengelolaan sampah yang dinamakan SUMPAAH BERUANG (Sulap Sampah Berubah Uang) telah menjadi percontohan dan kandidat tuan rumah terpilih dalam acara *2nd City Windows Series*, yang direkomendasikan oleh Pemerintah Indonesia melalui KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Banyumas adalah Kabupaten pertama di Indonesia yang menjadi tuan rumah acara dari program *Smart Green ASEAN Cities*

(SGAC) yang didanai oleh Uni Eropa. Program ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kapasitas kota-kota ASEAN dalam pengembangan kota yang ramah lingkungan dan cerdas melalui pertukaran pengalaman EU-ASEAN. Hal ini menandakan bahwa Banyumas telah memiliki level ditingkat ASEAN.

Achmad Husein telah menjabat dua periode sejak tahun 2013. Dia mengakhiri masa jabatannya sebagai Bupati pada 24 September 2023. Meski tidak lagi menjabat sebagai Bupati, beberapa waktu yang lalu, pada 14 Juni 2024, Achmad Husein menjadi narasumber dalam podcast kasisolusi di youtube. *Channel* youtube ini menggeluti bidang edukasi UMKM. Dalam podcast tersebut, Husein membagi cerita mengenai pengalaman dan *struggle* dalam menemukan solusi untuk *problem* persampahan di Banyumas. Hal yang menarik di podcast, penulis menyoroti sikap perilaku narasumber Husein yang antikoruptif dan memiliki komitmen tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah sampah. Achmad Husein menunjukkan komitmennya sebagai seorang pemimpin yang cepat merespons masalah warga yang dipimpinnnya dengan memastikan bahwa masalah yang dialami warganya dapat diselesaikan secara tuntas.

Deryansha Azhary, *host* podcast kasisolusi, menyebut Husein sebagai pemimpin yang visioner karena dia mampu melakukan rangkaian riset yang panjang dan menghasilkan mesin-mesin pemilah sampah yang bersih dan tuntas sehingga Banyumas tidak lagi memiliki TPA karena sampah-sampah telah habis dikelola(kasisolusi, 2024). Deryansha mengatakan, Husein berhasil menjalankan *waste management* yang sesungguhnya. Hal ini ditandai dengan kesuksesannya memanfaatkan sampah dan residunya menjadi produk-produk yang bernilai ekonomi(kasisolusi, 2024). Hal ini menjadikan penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih lanjut, bagaimana sikap kepemimpinan Achmad Husein yang mencerminkan adanya *good governance*, serta penulis juga tertarik mengamati dampak ekonomi dari pengelolaan sampah di Banyumas, apakah hal tersebut dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat (Pratama, 2024a).

Penulis melihat kurangnya penelitian dalam hal keteladanan tokoh yang menjalankan kepemimpinannya dengan penuh tanggung jawab berdasarkan *good governance*. Pentingnya penelitian ini bertujuan memotivasi dan menginspirasi semua kalangan untuk kembali berkomitmen menjaga integritas kerja yang tinggi, dengan bertanggung jawab

atas pekerjaan yang diamanatkan, mengerjakan dengan penuh profesionalitas, serta menjauhkan diri dari kepentingan pribadi dan perilaku yang koruptif.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana analisis hasil penelitian berupa data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan, serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Diniyanto, 2021, 2021, 2022; Fadli, 2021). Penulis mengumpulkan data yang diperlukan melalui teknik analisis isi (content analysis) (Elo et al., 2014). Sebuah teknik penelitian ilmiah yang digunakan untuk mengidentifikasi gambaran dari isi (content) tertentu sebagai ukuran suatu fenomena (Asfar & Taufan, 2019; Liauw, 2022; Muslim, 2018). Data yang dianalisis berupa content podcast dalam youtube channel kasisolusi. Adapun sumber data sekunder meliputi:

- a. Dokumentasi: Mengumpulkan dokumen resmi, laporan pemerintah, dan regulasi yang terkait dengan kebijakan pengelolaan sampah di Banyumas.
- b. Sumber media: Menelaah artikel, video, dan publikasi dari media massa yang melaporkan tentang kebijakan serta teknis pengelolaan sampah di Banyumas. Salah satu sumber utama adalah konten dari youtube channel kasisolusi.
- c. Laporan dan studi terdahulu: Meninjau laporan penelitian dan jurnal ilmiah yang telah membahas topik serupa, khususnya yang terkait dengan *good governance* dan pengelolaan sampah.

Pembahasan

1. Penanganan dan Pengelolaan Sampah serta Dampak Ekonominya pada Kepemimpinan Eks Bupati Banyumas Achmad Husein

Istilah *good governance* pertama kali disebutkan dalam laporan penelitian *World Bank* (1989), *Sub-Sahara Africa: From Crisis to Sustainable Growth – A Long-Term Perspective Study*. Dalam satu dekade, ide tersebut mengkristal menjadi proyek kebijakan pembangunan internasional yang paling populer. Sejumlah lembaga internasional seperti *International Monetary Fund* (IMF), *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), dan *United Nations Development Programme* (UNDP) mengadopsi agenda *good governance*. Lembaga-

lembaga tersebut menempatkan proyek kebijakan ini menjadi agenda besar mereka dan mendefinisikan kembali kerangka konseptual kebijakannya.

Salah satu organisasi yang menaruh perhatian khusus pada ide *good governance* adalah *United Nations Development Programme* (UNDP). Misi dan mandat UNDP adalah mewujudkan pembangunan manusia secara berkelanjutan di negara-negara berkembang, hal tersebut berkaitan dengan *good governance*. Konsepnya dituangkan ke dalam *paper* kebijakan tahun 1997, dengan judul *Governance for Sustainable Human Development* (UNDP Policy Document, 1997). UNDP merumuskan karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktik penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) (Quadrat-I Elahi, 2009), prinsip-prinsipnya antara lain: (a) Partisipasi; (b) Penegakan hukum; (c) Transparansi; (d) Daya tanggap (*responsive*); (e) Berorientasi konsensus; (f) Berkeadilan; (g) Efektivitas dan efisiensi; (h) Akuntabilitas; (i) Visi strategis.

Mencari orang yang jujur dan memiliki integritas tinggi sama halnya dengan mencari jarum dalam tumpukan jerami. Memilih aparatur atau pelaku pemerintahan yang unggul akan berpengaruh baik dengan penyelenggaraan negara (Kuswanto, 2012). *World Bank* mendefinisikan *good governance* sebagai cara di mana kekuasaan dijalankan dalam suatu pemerintahan dengan pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial untuk pembangunannya (Drake et al., 2003; Word Bank, 1992). Sampah di Banyumas ditangani secara berkelanjutan dengan pemanfaatan sampah menjadi bahan baku yang bernilai ekonomi, melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan, serta kemampuan pemerintah dalam menyerap tenaga kerja (Pratama & Yusron, 2024). Hal tersebut terwujud atas inisiatif eks Bupati Achmad Husein yang pada masa jabatannya memastikan pembangunan berlandaskan pada pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial dapat berjalan dengan baik.

Melalui podcast kasisolusi, eks Bupati Banyumas, Ir. Achmad Husein mengungkapkan beberapa *point* penting mengenai penanganan pengelolaan sampah dan dampak ekonominya. Peneliti mengembangkannya dengan tabel di bawah ini.



Tabel 2. Pengelolaan sampah dan dampak ekonomi di Banyumas

No	Waktu	Deskripsi
1.	00:01:54	Awalnya, pada Mei 2018, Banyumas mengalami hujan deras yang menyebabkan TPA di desa Kaliiori jebol. Tanggul penahan sampah pecah dan kolam lindi di TPA mengalami kebocoran mengakibatkan sampah-sampah menyebar ke lingkungan sekitar dan meracuni persawahan, mencemari tanah, sungai, dan permukiman warga. Dalam situasi ini, Bupati menemukan solusi dengan pengelolaan sampah dari sumbernya yang dia sebut sebagai proses pengelolaan pada tahap “hulu”. Tahap hulu dimaksudkan mengelola sampah dengan memilahnya di tingkat rumah tangga yang kemudian dijual kepada pemerintah melalui aplikasi SALINMAS dan Jeknyong. Berikutnya, Bupati juga mengambil kebijakan untuk mengelola sampah dengan sistem pemilahan dan pengelolaan melalui fasilitas yang dikenal sebagai hanggar. Seiring waktu, hanggar berkembang menjadi TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu), TPS 3R (Tempat Pembuangan Sampah <i>reuse, reduce, recycle</i>), dan PDU (Pusat Daur Ulang). Selain itu, Bupati juga mengembangkan alat-alat pengelolaan sampah sendiri. Sampah dipilah di lokasi tersebut, dengan sampah organik diolah menjadi pakan maggot,

-
- sedangkan sampah anorganik diubah menjadi produk lain. Dari tahun 2018 hingga 2023, terutama di Kota Purwokerto, pengelolaan sampah sudah mencapai sekitar 90%, dan sisanya dikelola di TPA BLE (Tempat Pembuangan Akhir Berbasis Lingkungan dan Edukasi) (Ma'rup et al., 2023).
2. 00:02:33 & Pada masa pemerintahan Ir. Achmad Husein sebagai
00:08:08 Bupati Banyumas, berbagai program telah dilaksanakan untuk meningkatkan pengelolaan sampah. Berikut adalah beberapa program utama yang dilakukan:
- a. KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat). Mendirikan kelompok swadaya masyarakat di setiap kelurahan dan kecamatan untuk mengelola sampah secara lokal. KSM bertujuan mengelola sampah di tingkat komunitas dan membantu masyarakat yang tidak bisa mengolah sampahnya sendiri. Saat ini telah berkembang sebanyak 36 KSM dengan masing-masing pegawai 30 hingga 40 orang. KSM adalah komunitas yang penghidupannya dari pengelolaan sampah yang telah berjalan sejak 2019.
 - b. Peluncuran aplikasi online untuk sampah, SALINMAS dan Jeknyong. Digunakan warga yang telah memilah sampah di rumah. Bila jumlah pilahan sampah sudah cukup, dengan layanan aplikasi, petugas TPA Terpadu akan datang membelinya.
 - c. Pemilahan sampah di tingkat rumah tangga tidak optimal, sehingga dilakukan lagi pemilahan sampah yang sudah diterima di satu tempat
-

hanggar dengan bantuan alat *belt conveyer* untuk memilah sampah langsung menggunakan tangan oleh 80 orang dari masyarakat.

- d. Peternakan ulat maggot yang dikembangkan hingga menjadi UMKM. Ulat maggot dijual untuk pakan ikan dan unggas. Peternakan ulat maggot berasal dari sampah organik yang diubah menjadi bahan baku organik yang dipakai sebagai media biakan ulat maggot, yang bentuknya mirip belatung. Ulat maggot ini adalah larva dari lalat buah *black soldier fly* (lalat tempayak). Sisa dari sampah organik yang membusuk itu laku dijual sebagai kompos (Trihusodo, 2022).

3. 00:13:50

Ir. Achmad Husein, sebagai Bupati Banyumas yang menjabat, menunjukkan komitmen yang luar biasa terhadap pengelolaan sampah dengan menggunakan uang pribadinya untuk mendanai berbagai riset dan pengembangan solusi pengelolaan sampah. Karena adanya peraturan anggaran APBD yang sudah ditentukan tidak memungkinkan untuk digunakan dalam penyelesaian krisis sampah akibat bencana lingkungan, maka Achmad Husein menggunakan anggaran BOP pribadi (Biaya Operasional kepala daerah) dengan besaran 66 juta rupiah. Kemudian, dia mengumpulkan bantuan gotong royong CSR (*corporate social responsibility*) dari beberapa perusahaan serta BUMD seperti bank, rumah sakit, dan PDAM untuk melakukan riset membuat alat guna pengelolaan sampah di Banyumas. Pengelolaan sampah tersebut dibagi menjadi tiga tahap dengan melibatkan masyarakat:

- a. Hulu: Masyarakat memilah sampah dari sumber
-

organik dan anorganik, disiapkan aplikasi SALINMAS dan Jeknyong sebagai fasilitas angkutan sampah yang dioperasikan oleh KSM untuk masyarakat menjual sampahnya yang sudah dipilah. Di hanggar juga dilakukan pemilahan langsung dengan tangan dari alat *belt conveyer* oleh 80 orang dari masyarakat.

- b. Tengah: Pemilahan di hanggar belum tuntas, oleh karena itu dibangun PDU (Pusat Daur Ulang). Kerja PDU kurang maksimal, sehingga kemudian dilakukan pembuatan mesin-mesin pemilah sampah organik dan anorganik yang didesain langsung oleh Achmad Husein. Mesin-mesin tersebut selanjutnya menjadi alat pengolahan sampah yang dioperasikan oleh KSM di TPST/TPS3R/PDU.
- c. Hilir: Sisa pengolahan sampah pada TPST/PDU/TPS3R kemudian diolah di TPA BLE oleh pemerintah (Kementerian PUPR), sedangkan residunya dibakar menggunakan pirolisis non insenerator.

4. 00:19:24
00:29:50

& Atas keberhasilan penanggulangan krisis sampah, Achmad Husein disebut-sebut sebagai “Bapak Sampah Indonesia”. Husein juga menciptakan sebuah inisiatif yang disebut SUMPAAH BERUANG (Sulap Sampah Berubah Menjadi Uang). Program ini dijalankan mulai tahun 2022, yang membedakan Banyumas dari kabupaten lain. Sampah agar dapat bernilai ekonomi harus diubah menjadi bahan baku terlebih dahulu. Sampah dapat menjadi bahan baku setelah diolah dengan mesin pemilah sampah yang telah dibuat oleh

Achmad Husein. Adapun konversi sampah antara lain menjadi:

- a. Sampah organik diubah menjadi media budi daya ulat maggot dan kompos. Selain itu, sampah organik juga diproses lagi menjadi bahan baku sebagai biomassa untuk campuran bahan bakar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Hal tersebut dapat mendukung arahan Pemerintah yang mendorong PLTU untuk beralih ke biomassa yang ramah lingkungan, ketimbang bahan bakar batu bara yang *pollutant*.
- b. Sampah plastik dirajang dan dijual menjadi RDF (*refuse derived fuel*) untuk bahan bakar tambahan pabrik semen.
- c. Residu sampah diolah dalam instalasi pembakaran sampah yang dibangun dan dilaksanakan dengan menggandeng Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR. Instalasi ini disebut TPA Berbasis Lingkungan dan Edukasi (BLE) di Desa Wlahar Wetan. Kapasitasnya 75 ton residu sampah per hari. Residu sampahnya diambil dari TPS Terpadu terdekat yang dipilah berdasarkan logam, kaca, dan keramik, yang kemudian masuk ke ruang bakar yang bersuhu 800 derajat Celsius. Hasil pembakarannya bersih. Dalam situasi yang miskin oksigen, pembakaran itu menghasilkan arang, dan hanya sedikit yang teroksidasi menjadi CO₂. Debu arang dari instalasi ini digunakan untuk campuran pembuatan *paving* (material pengeras jalan). *Paving*-nya itu sendiri dihasilkan dari pengolahan limbah plastik dan campuran debu

pirolisis. Produksi *paving* juga dilakukan di TPA BLE Desa Wlahar Wetan.

Host podcast, Deryansha Azhary menyebut eks Bupati Achmad Husein sebagai pemimpin visioner yang mampu menjalankan *waste management* sesungguhnya. Husein mengungkapkan keberhasilannya itu karena dia melakukan berbagai riset panjang yang menghasilkan mesin yang tepat. Mesin-mesin itulah yang kemudian dapat menyelesaikan masalah. Banyumas kini tidak lagi memiliki TPA karena masalah sudah selesai.

5. 00:32:47

Achmad Husein menyebutkan berbagai riset yang dijalani menghabiskan biaya sebesar 2 Miliar. Adapun *profit* dapat terlihat dari suksesnya SUMPAAH BERUANG dan efektivitas kinerja KSM selama 3 tahun, yang hingga saat ini masih berjalan dengan baik. Bidang persampahan yang mampu menghidupi masyarakat ini merupakan bagian dari UMKM yang menjadi salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi di Banyumas.

Masyarakat yang terlibat langsung dalam UMKM di bidang persampahan ada sebanyak 900 hingga 1000 orang. Adapun UMKM yang terlibat secara tidak langsung, sebanyak 10.000 orang. Para pengelola sampah ini bergantung hidup dengan UMKM di bidang persampahan yang mampu menghidupi mereka secara berkelanjutan.

6. 00:41:56

Delegasi dari negara-negara Eropa dan ASEAN mengungkapkan kekaguman terhadap pengelolaan sampah yang dilakukan di Banyumas. Kunjungan mereka mengungkapkan beberapa aspek positif dari sistem pengelolaan sampah yang sukses pelaksanaannya

karena didukung dengan kebijakan, inisiatif dan inovasi yang tepat.

Keberhasilan dalam mengatasi krisis sampah di Banyumas telah membawa Achmad Husein ke panggung internasional, menjadikannya figur penting dalam diskusi global tentang pengelolaan lingkungan dan sampah.

2. Analisis Implementasi Prinsip *Good Governance* pada Kepemimpinan Achmad Husein dalam Pengelolaan Sampah di Banyumas (Studi Kasus Konten Podcast Kasisolusi)

Pemerintahan yang baik (*good governance*) hanya dapat dibangun oleh orang yang baik dan sistem yang baik (Khasanah, 2023). Selain sistem yang baik dengan berbagai program yang menyertai, seorang pemimpin dalam menjalankan pemerintahannya juga harus memiliki *leadership* yang kuat. *Leadership* atau jiwa kepemimpinan erat kaitannya dengan akuntabilitas yang memastikan kerja pemimpin dan jajaran timnya berjalan dengan efektif. Terlebih ketika menghadapi masalah yang tidak terduga seperti bencana alam. Hal tersebut menjadi tantangan besar bagi seorang pemimpin untuk merespons dengan cepat. Seorang pemimpin yang berintegritas akan memastikan komitmennya untuk bertanggung jawab, menanggung segala sesuatu dan memberikan jawab atas permasalahan. Hal ini pada prinsip *good governance* disebut dengan akuntabilitas.

Eks Bupati Achmad Husein, ketika menghadapi masalah bencana lingkungan akibat curah hujan yang tinggi dan menyebabkan krisis sampah di Kabupaten Banyumas tidak pernah menyerah. Dia membuat sistem pengelolaan sampah yang memadai untuk daerahnya. Dimulai dari program penyaluran daur ulang sampah melalui aplikasi-aplikasi sampah, program 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), peternakan ulat maggot, mendorong partisipasi masyarakat melalui pembentukan KSM, pemilahan sampah, pembuatan mesin-mesin pemilah sampah, pembangunan hanggar-hanggar untuk TPS Terpadu, PDU, dan TPA BLE, hingga program SUMPAH BERUANG yang berhasil membawa Banyumas keluar dari persoalan sampah. Menurut Achmad Husein, cobaan krisis sampah adalah *blessing in disguise* bagi Banyumas. *Blessing* terlihat pada sistem kelola sampah yang memungkinkan

sampah diubah menjadi produk-produk bernilai ekonomi dan berkelanjutan, serta terwujudnya lingkungan yang kian bersih dan sehat.

Sistem pengelolaan sampah yang demikian *settled* dan tertib di Banyumas diharapkan dapat terus berjalan dan *sustain*. Achmad Husein pun berkeyakinan dan percaya pemerintah daerah yang selanjutnya akan tetap meneruskan sistem pengelolaan yang telah berjalan dengan baik. Dalam hal ini, Husein memiliki satu ungkapan atas keyakinannya, yaitu “*mikul duwur, mendem njero*”, yang berarti bahwa *legacy* apa pun yang baik pasti akan dihargai dan dilanjutkan, sementara kekurangan terdahulu mestinya ditinggalkan dan tidak menjadi bahan olokan (kasisolusi, 2024).

Nilai keteladanan yang ditunjukkan oleh Achmad Husein secara garis besar adalah nilai integritas dan jiwa *leadership* penuh tanggung jawab. Hal tersebut terlihat dari perilaku Husein semasa menjabat dan menangani masalah sampah, ternyata dia banyak menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Transparansi dalam pengelolaan dana dan akuntabilitas dalam setiap langkah yang diambil mencerminkan integritas yang tinggi (Inayati & Pratama, 2022). Hal ini memberikan contoh yang baik bagi para pemimpin lainnya tentang bagaimana mengelola sumber daya publik dengan jujur dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, penulis melakukan analisis terhadap implementasi prinsip *good governance* pada kepemimpinan Achmad Husein berdasarkan teori yang diusung *United Nations Development Programme* (UNDP). Prinsip-prinsip *good governance* yang tercermin pada kepemimpinan Achmad Husein meliputi:

1. Partisipasi

Achmad Husein melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengelolaan sampah. Awal mula kejadian bencana lingkungan di Banyumas pada Mei 2018, Husein melakukan pendekatan kepada masyarakat yang terdampak langsung. Pendekatan *silaturrahim* dan dialog dia lakukan secara maksimal dengan melipatgandakan *effort*, yaitu dengan mendatangi lebih banyak masyarakat dan mempelajari permasalahan secara serius (kasisolusi, 2024).

Pendekatan partisipasi masyarakat tidak hanya meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan dan tanggung jawab masyarakat terhadap lingkungan mereka. Partisipasi aktif masyarakat memastikan bahwa program pengelolaan sampah diterima dengan baik dan berjalan lancar (Inayati et al., 2022). Salah satu contoh konkret adalah pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat

(KSM) yang tersebar di setiap kelurahan dan kecamatan. Masyarakat didorong untuk memilah sampah organik dan anorganik di tingkat rumah tangga serta menerima insentif untuk partisipasi mereka. Program tersebut dikoordinir oleh KSM. Selain itu, seluruh proses pengelolaan sampah di setiap hanggar pun dioperasikan oleh KSM. Penyerapan tenaga kerja melalui KSM adalah manifestasi dari prinsip partisipasi yang baik.

Oleh karena itu, menurut analisis penulis, dalam kepemimpinan Achmad Husein terdapat prinsip partisipasi yang unggul. Hal ini dibuktikan dengan adanya tindakan selalu mengikutsertakan masyarakat pada setiap tahapan penyelesaian masalah sampah. Husein melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk memperkuat rasa kepemilikan terhadap lingkungan dan mendorong partisipasi masyarakat melalui Kelompok Swadaya Masyarakat. KSM adalah kelompok masyarakat yang paling banyak terlibat langsung menangani pengelolaan sampah. Menurut Husein, rangkaian pengelolaan sampah ini membawa berkah untuk Banyumas, salah satu berkahnya terlihat dari terbukanya UMKM bidang persampahan yang mampu menyerap banyak tenaga kerja.

2. Transparansi

Penggunaan dana pribadi oleh Achmad Husein untuk riset dan pengembangan alat pengelolaan sampah dilakukan secara terbuka dan dilaporkan kepada publik. Husein menggunakan anggaran BOP pribadi (Biaya Operasional kepala daerah) dengan besaran 66 juta rupiah. Kemudian dia mengumpulkan bantuan gotong royong dari CSR (*corporate social responsibility*) beberapa perusahaan, serta BUMD seperti bank, rumah sakit, PDAM, dll. untuk melakukan riset berulang kali hingga menghasilkan alat guna pengelolaan sampah yang memadai (Pratama et al., 2018). Di samping itu, adanya peluncuran aplikasi SALINMAS (Sampah Online Banyumas) memungkinkan masyarakat untuk melihat proses pengelolaan sampah secara *real-time* dan memberikan *feedback*.

Menurut penulis, kepemimpinan Achmad Husein sudah menunjukkan adanya prinsip transparansi dengan jelas. Hal tersebut terlihat pada transparansi dalam penggunaan dana dan rangkaian riset. Adanya transparansi dalam penggunaan dana dan proses pengelolaan sampah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, penyediaan layanan informasi yang mudah diakses masyarakat menunjukkan keseriusan dan komitmen pemerintah daerah terhadap keterbukaan dan akuntabilitas pengelolaan sampah (Gedeona, 2005).

3. Akuntabilitas

Achmad Husein dan timnya bertanggung jawab penuh atas setiap kebijakan dan tindakan yang diambil dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan dana publik dan pribadi dilakukan dengan akuntabilitas tinggi, dan setiap langkah dalam pengelolaan sampah dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pihak terkait. Akuntabilitas yang tinggi memastikan bahwa semua tindakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan, mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan korupsi. Hal tersebut juga menciptakan kepercayaan di antara masyarakat bahwa pemimpin mereka bekerja demi kepentingan bersama.

Penulis menilai, perilaku Achmad Husein sebagai pemimpin telah menjalankan prinsip akuntabilitas dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai inisiatif yang diluncurkannya. Keberhasilannya menanggulangi krisis sampah tanpa terlibat dalam perilaku koruptif menunjukkan bahwa Husein mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Dia juga menunjukkan bahwa pemimpin yang bersih dan transparan dapat mencapai hasil yang signifikan tanpa harus mengorbankan integritas (Pratama & Aziz, 2024). Dengan demikian, Achmad Husein telah membuktikan bahwa kepemimpinan yang bertanggung jawab dan bebas dari korupsi adalah kunci untuk mencapai keberhasilan dalam mengelola isu-isu publik yang kompleks seperti pengelolaan sampah.

4. Efektivitas dan Efisiensi

Penggunaan teknologi, seperti mesin pirolisis, dan penerapan program 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) menunjukkan upaya untuk mengelola sampah secara efektif dan efisien. Sistem pengelolaan sampah yang terstruktur dari hulu ke hilir memastikan bahwa setiap tahap pengelolaan berjalan lancar dan optimal (Inayati et al., 2022). Efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sampah mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan menghemat sumber daya. Penggunaan teknologi dan metode yang tepat memastikan bahwa sampah dikelola dengan cara yang paling produktif dan ramah lingkungan.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis melihat Achmad Husein sebagai inisiator sistem pengelolaan sampah telah sukses mencapai prinsip efektivitas dan efisiensi *good governance*. Menurut *United Nations Development Programme*, prinsip efektivitas dan efisiensi

adalah proses menciptakan hasil yang memenuhi kebutuhan dengan memanfaatkan sumber daya dengan sebaik-baiknya (UNDP Policy Document, 1997). Hal tersebut berarti merujuk pada kemampuan untuk menggunakan sumber daya dengan cara yang paling optimal dan menghasilkan output yang maksimal. Sampah di Banyumas ditangani secara optimal; pemanfaatan sampah menjadi bahan baku yang bernilai ekonomi dengan bantuan alat mesin pengelolaan sampah buatan sendiri, dan pada setiap tahapan kelolanya juga melibatkan peran masyarakat sebagai operator. Achmad Husein berkontribusi menciptakan mesin pemilah sampah, mendorong pemanfaatan sumber daya manusia melalui masyarakat sebagai tenaga kerja yang mengoperasikan seluruh tahap pengelolaan sampah, serta memproses segala bentuk sampah menjadi bahan yang berguna. Langkah-langkah yang diambil tersebut telah menunjukkan keberhasilannya, sehingga dapat dikatakan solusi tepat guna yang menandakan adanya nilai efisiensi. Sampah yang kerap dianggap sebagai bahan akhir yang tidak berguna lagi ternyata dapat diolah menjadi bahan baku yang siap pakai. Keberhasilan dalam melakukan perubahan terhadap sampah tersebut menunjukkan adanya manifestasi efektivitas.

5. Responsif

Respons cepat Achmad Husein terhadap krisis sampah di tahun 2018 menunjukkan sifat responsif dalam kepemimpinannya. Langkah-langkah seperti mendirikan fasilitas pengelolaan sampah dan meluncurkan aplikasi pengelolaan sampah diambil segera setelah masalah teridentifikasi. Responsif terhadap masalah memungkinkan pemerintah untuk menyelesaikan isu-isu dengan cepat sebelum berkembang menjadi krisis yang lebih besar. Ini juga menunjukkan komitmen pemerintah untuk melayani dan melindungi kepentingan masyarakat (Pratama, 2024a).

Penulis menganalisis eks Bupati Achmad Husein sebagai pemimpin daerah Banyumas pada waktu itu telah menunjukkan prinsip responsif berdasarkan teori *good governance*. Berbekal perasaan empati dan memahami kesusahan masyarakat yang terdampak, Husein bertekad untuk bertanggung jawab dengan segera merespons masyarakat. Pada momentum berpikir ketika mencari jalan keluar, dia berjanji pada dirinya untuk membalikkan kondisi tersebut menjadi berkah. Meskipun Husein sempat mendapat banyak kritik, dia membuktikan komitmennya dalam menanggapi masyarakat dan petani yang terdampak, dengan menghampiri mereka secara langsung dan melihat dampaknya di lapangan (Agung Barok Pratama, Arina Manasikana, 2023). Kemudian,

dia bekerja menemukan solusi secara optimal, dengan memberikan pelayanan edukasi proses pemilahan sampah di tingkat rumah tangga, membuka layanan online untuk angkutan sampah, memberdayakan masyarakat lewat pembentukan KSM, mengembangkan budi daya ulat maggot, melakukan riset dan pembuatan mesin pemilah sampah, membuka hanggar-hanggar pengelolaan sampah, serta memproses seluruh sampah menjadi bahan baku bermanfaat yang dia sebut dengan SUMPAAH BERUANG (Sulap Sampah Berubah Uang). Hal tersebut menunjukkan bahwa prinsip responsif memastikan pelayanan kebutuhan masyarakat terpenuhi.

6. Keadilan (*equity*)

Kebijakan pengelolaan sampah di Banyumas memastikan bahwa semua kelompok masyarakat, termasuk yang berada di wilayah terpencil, mendapat manfaat dari program ini. Program KSM dan insentif untuk memilah sampah dirancang untuk inklusif dan adil bagi semua warga. Keberlanjutan dan kesuksesan program pengelolaan sampah sangat bergantung pada keadilan dan juga nilai inklusivitas. Dengan memastikan semua lapisan masyarakat terlibat dan mendapat manfaat, menandakan bahwa program ini mengakomodasi keadilan dan kesejahteraan sosial.

Menurut analisis penulis, kepemimpinan Achmad Husein sudah menjalankan prinsip keadilan dengan baik dan sesuai dengan maksud *equity* yang dideskripsikan oleh UNDP, yaitu semua lapisan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan untuk hidup lebih baik dan terjaga kesejahtraannya (UNDP Policy Document, 1997) Achmad Husein beserta jajarannya dalam pemerintahan memastikan keadaan yang semula darurat sampah dan meresahkan masyarakat dapat teratasi dengan baik. Pada tahap pemulihan, lingkungan menjadi bersih dan kesejahteraan sosial dapat terpelihara dengan terbukanya berbagai UMKM di bidang pengelolaan sampah yang berhasil dikembangkan oleh KSM melalui fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah (Umam & Pratama, 2023).

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, ditemukan adanya praktik *good governance* pada kepemimpinan eks Bupati Achmad Husein dalam pengelolaan sampah di Banyumas. Prinsip-prinsip *good governance* berupa partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, responsif, serta keadilan (*equity*) dijalankan dengan baik oleh

pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Achmad Husein. Keberhasilan daerah mengatasi persoalan sampah yang serius tidak lepas dari andil pemimpinnya yang memiliki *skill problem solving*, integritas kerja tinggi, dan jiwa *leadership* yang baik. Pemimpin mampu *leading* pemerintahannya untuk menanggung dan menjawab persoalan yang dihadapi. Persoalan sampah adalah tantangan lingkungan yang tidak mudah dan tidak semua pemimpin mampu mengatasinya. Tidak banyak pemimpin yang mampu memusatkan konsentrasinya pada penyelesaian masalah sampah. Oleh karena itu, keteladanan tokoh yang menjalankan kepemimpinannya dengan karakteristik *good governance* seperti Achmad Husein, perlu disebarkan sebagai bentuk penyadaran, memastikan dorongan motivasi dan inspirasi bagi semua kalangan untuk kembali berkomitmen menanggung jawab pekerjaan yang diamanatkan dan menjauhkan diri dari perilaku koruptif agar permasalahan yang membebani daerah dan rakyat dapat diatasi.

Gaya *leadership* Achmad Husein yang baik juga dapat terlihat dari partisipasi aktif masyarakat yang berkelanjutan dalam mengelola sampah. Kerja sama antara pemerintah dan masyarakat tidak hanya meningkatkan efektivitas program, tetapi juga membangun rasa tanggung jawab bersama terhadap lingkungan. Selain itu, kontribusi masyarakat juga memberikan dampak ekonomi yang baik bagi kesejahteraan sosial. Keberhasilan sistem pengelolaan sampah di Banyumas telah membuka banyak UMKM di bidang persampahan yang turut berperan mendukung pertumbuhan ekonomi kabupaten Banyumas. Penulis merekomendasikan agar keberhasilan praktik-praktik *good governance* dalam mengatasi sampah di Banyumas dapat direplikasi di wilayah lain dengan penyesuaian-penyesuaian tertentu. Prinsip *good governance* penting untuk selalu diimplementasikan dan menjadi sebuah budaya, lebih-lebih menjadi karakter yang melekat, sehingga tantangan krisis yang terjadi secara tidak terduga dapat direspons dan diatasi dengan cepat. Kepemimpinan yang berintegritas dan berkarakter *good governance* tidak hanya meningkatkan kualitas lingkungan tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Daftar Pustaka

- Asfar, I. T., & Taufan, I. (2019). Analisis naratif, analisis konten, dan analisis semiotik (Penelitian kualitatif). *No. January*, 1–13.
- Diniyanto, A. (2021). Bertahan dan Menang Melawan Pandemi Covid-19 dengan Semangat Pancasila. *Jurnal Lembannas RI*, 9(4), 1–16. <https://doi.org/10.55960/jlri.v9i4.412>

- Diniyanto, A. (2021). PERATURAN DAERAH DANA CADANGAN: STRATEGI ALTERNATIF PEMBANGUNAN DAERAH. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(4), 478. <https://doi.org/10.54629/jli.v18i4.803>
- Diniyanto, A. (2022). Desain Pembentukan Peraturan Desa yang Demokratis dan Aspiratif. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 353. <https://doi.org/10.54629/jli.v19i3.902>
- Drake, E., Malik, A., Xu, Y., Kotsioni, I., El-Habashy, R., & Misra, V. (2003). *Good Governance and the World Bank Based on research*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:16929859>
- Elo, S., Kääriäinen, M., Kanste, O., Pölkki, T., Utriainen, K., & Kyngäs, H. (2014). Qualitative Content Analysis. *SAGE Open*, 4(1), 215824401452263. <https://doi.org/10.1177/2158244014522633>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *HUMANIKA*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Gedeona, H. T. (2005). Transparansi pengelolaan anggaran daerah: sebuah alternatif pemberantasan korupsi di tingkat daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 2(3), 4.
- Kuswanto, G. (2012, August 30). *PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA*. Banyumaskab.Go.Id. <https://www.banyumaskab.go.id/read/15538/pelaksanaan-good-governance-di-indonesia>
- Governance for sustainable human development: a UNDP policy document* (pp. v, 40 p.). (1997). UNDP,. <https://digitallibrary.un.org/record/492551>
- Jambeck, J. R., Geyer, R., Wilcox, C., Siegler, T. R., Perryman, M., Andrady, A., Narayan, R., & Law, K. L. (2015). Plastic waste inputs from land into the ocean. *Science*, 347(6223), 768–771. <https://doi.org/10.1126/science.1260352>
- kasisolusi. (2024). Gak Semuanya Koruptor! Mantan Bupati Banyumas Ini Rela Pake Uang Pribadi Buat Beresin Masalah Sampah . In *YouTube*. https://youtu.be/JGrLRTgAD6k?si=1_7B5yGvM7TbHu2P
- Khasanah, K. (2023). Pelaksanaan Prinsip Good Governance di Desa Warungasem Kabupaten Batang. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 3(01), 27–40.
- Liauw, T. T. (2022). Content Analysis and Its Application with Dynamic Online Content. *Jurnal Teknik Industri*, 24(2), 105–116. <https://doi.org/10.9744/jti.24.2.105-116>
- Ma'rup, M., Kurniasih, D., & Tobirin, T. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Banyumas Melalui Program Sumpah Beruang (Sulap Sampah Berubah Uang). *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan*, 14(7), 808–816.
- Muslim, M. (2018). VARIAN-VARIAN PARADIGMA, PENDEKATAN, METODE, DAN JENIS PENELITIAN DALAM ILMU KOMUNIKASI. *Media Bahasa, Sastra, Dan Budaya Wahana*, 1(10). <https://doi.org/10.33751/wahana.v1i10.654>
- Qudrat-I Elahi, K. (2009). UNDP on good governance. *International Journal of Social Economics*, 36(12), 1167–1180. <https://doi.org/10.1108/03068290910996981>

- Suyanto, E., Soetarto, E., Sumardjo, S., & Hardjomidjojo, H. S. (2015). Model Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Partisipasi Green Community Mendukung Kota Hijau. *MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 31(1), 143. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v31i1.1295>
- Trihusodo, P. (2022, December 2). *Cerita Sukses Menangani Sampah, dari Banyumas ke Mesir*. Indonesia.Go.Id Portal Informasi Indonesia. <https://www.indonesia.go.id/kategori/feature/6710/cerita-sukses-menangani-sampah-dari-banyumas-ke-mesir?lang=1>
- World Bank, T. (1992). *Governance and development*. <http://documents.worldbank.org/curated/en/604951468739447676/Governance-and-development>

DEKLARASI KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam penerbitan artikel ini.

INFORMASI PENDANAAN

Tidak ada

PENGHARGAAN

Para penulis berterima kasih kepada peninjau anonim artikel ini atas komentar dan umpan balik mereka yang berharga.

RIWAYAT ARTIKEL

Diserahkan : 15 Oktober 2024
Revisi : 09 November 2024
Diterima : 19 Desember 2024
Diterbitkan : 21 Desember 2024